

Mendayung (Memanipulasi Wacana) di Antara Dua Karang: *Discursive Hedging* Indonesia dalam Indo-Pasifik

Kevin Ali Sesarianto
Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta
kevin@iisip.ac.id

Abstract

In the Indo-Pacific constellation which targets political, security and economic issues, Indonesia is constructed as a middle power country. This construction originates from the political reality that Indonesia must hedge between the influence of the United States and China. In other words, the Indo-Pacific is a construction in which there are conflicting interests of the two great powers. Using the postcolonial critical discourse analysis method, this paper explores the construction that Indonesia is doing in ASEAN regarding the Indo-Pacific, namely the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. This paper looks at two important things: (1) the discursive power relations embodied in Indo-Pacific discourse and (2) the activity of manipulating discourse so that Indonesia is merely in a "safe" position in the conflict of big powers, and even tends to take advantage of it. As a result of these findings, this paper reconstructs the identity and role of Indonesia's middle power: Indonesia is not a bearer of inclusivity or an honest broker, but merely a client of two major powers.

Keywords: *great power politics, Indo-Pacific, Indonesia, middle power, mimicry*

Abstrak

Dalam konstelasi Indo-Pasifik yang menyoar permasalahan politik, keamanan, dan ekonomi, Indonesia dikonstruksikan sebagai negara middle power. Konstruksi tersebut bersumber dari kenyataan politik bahwa Indonesia harus melakukan hedging di antara pengaruh Amerika Serikat dan Cina. Dengan kata lain, Indo-Pasifik adalah sebuah konstruksi yang terdapat pertentangan kepentingan dua great power di dalamnya. Menggunakan metode analisis wacana kritis poskolonial, tulisan ini mendalami konstruksi yang Indonesia lakukan dalam ASEAN terkait Indo-Pasifik, yakni ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Tulisan ini melihat dua hal penting: (1) relasi kuasa diskursif yang terkandung dalam pewacanaan Indo-Pasifik dan (2) aktivitas manipulasi wacana agar Indonesia sekedar berposisi "aman" dalam konflik kekuatan besar, bahkan cenderung memanfaatkan. Akibat temuan tersebut, tulisan ini merombak identitas dan peran middle power Indonesia: Indonesia bukan pembawa inklusivitas atau honest broker, tetapi sekedar klien dari dua kekuatan besar.

Kata Kunci: *great power politics, Indo-Pasifik, Indonesia, middle power, mimikri*

1. PENDAHULUAN

Indo-Pasifik bukan hanya merupakan konstruksi geopolitik yang netral, melainkan konstruksi geopolitik dan geoekonomi yang penuh kepentingan negara-negara besar.

Karena Indo-Pasifik merupakan sebuah konstruksi atau pewacanaan, maka realitas mengenai Indo-Pasifik bergantung pada agen mana yang melihatnya. Misalnya, ketika Amerika Serikat diposisikan sebagai agen yang menerima wacana Indo-Pasifik, wacana tersebut menjadi wacana *great power politics* antara Amerika Serikat dan Cina (Nagy 2022; Pan 2014). Ketika melihat dari sudut pandang agen lain, misalnya Indonesia, maka wacana tersebut tidak lagi terbatas pada konflik tetapi pewacanaan *middle power* dan manajemen *great power politics* yang tidak pesimis secara teleologis (Kim 2022), meskipun beberapa peneliti masih melihat *middle power* sekedar sebagai strategi *survival* dalam kontestasi *great power politics* (Iksan dan Soong 2022).

Salah satu negara yang dianggap sebagai *middle power* dalam kontestasi Indo-Pasifik adalah Indonesia. Perlu disebutkan terlebih dahulu bahwa identifikasi *middle power* tidak serta merta berlaku secara universal dalam artian semua negara yang dikonstruksikan sebagai *middle power* berarti akan bertindak serupa. Abbondanza (2022) memberikan tiga contoh negara *middle power* dalam konstruksi Asia-Pasifik: Australia, Korea Selatan, dan Indonesia. Dalam pembahasannya, ia menyatakan bahwa Australia memanfaatkan identifikasi *middle power*-nya dengan cara berpihak pada Amerika Serikat untuk membangun konstruksi Indo-Pasifik yang sesuai dengan visi Amerika Serikat. Lain halnya dengan Korea Selatan yang menggunakan identifikasi *middle power* untuk mendorong multilateralisme. Karena sifatnya yang tidak konfrontatif, Abbondanza menyebut fenomena ini sebagai *strategic ambiguity* (Abbondanza 2022, 406; lihat juga Huynh 2021). Indonesia, sebaliknya, berperan aktif dalam pembentukan wacana Indo-Pasifik: Indonesia tidak menghindari konflik secara pasif melainkan secara aktif membangun wacana jalan ketiga di Indo-Pasifik melalui ASEAN.

Meskipun Indonesia dibedakan dengan dua negara *middle power* lain dalam pembahasan yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini ingin membuktikan bahwa perilaku Indonesia sebagai *middle power* tidak jauh berbeda dengan perilaku *middle power* lain dalam konteks kontestasi Indo-Pasifik. Hal ini dilihat dari kelembaman Indonesia dalam menyelesaikan perseteruan dua pihak *great power* dalam Indo-Pasifik. Meskipun Indonesia tidak bisa dibebankan dalam hal etis sebagai negara yang bisa menyelesaikan perseteruan tersebut, Indonesia bisa dibebankan dalam hal etis sebagai negara yang tidak memanfaatkan *great power politics* untuk kepentingan pribadinya. Namun, tulisan ini menemukan bahwa Indonesia cenderung melakukan hal tersebut melalui strategi *discursive hedging*.

Tulisan ini terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, tulisan ini menjabarkan apa yang dimaksud dengan analisis wacana poskolonial. Bagian tersebut menjelaskan apa yang dimaksud dengan wacana, bagaimana wacana dikonstruksikan, dan apa kaitannya dengan poskolonialisme. Kedua, tulisan ini mengaitkan analisis wacana poskolonial dengan konsep mimikri, terutama mimikri tahap pertama. Dalam bagian tersebut, tulisan ini berargumen bahwa salah satu bentuk mimikri tahap pertama adalah penggunaan narasi yang sesuai dengan wacana yang diterima oleh *great power*. Ketiga, tulisan ini mengaitkan antara konsep yang sudah dijelaskan dalam dua bagian sebelumnya dan data empiris perilaku pewacanaan Indonesia dalam kaitannya dengan konstruksi Indo-Pasifik. Bagian tersebut menggarisbawahi konstruksi yang terdapat dalam *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam membangun jalan ketiga tersebut, peran Indonesia dipandang baik oleh beberapa peneliti. Misalnya, Anwar (2020) menyebutkan bahwa Indonesia berhasil melampaui strategi yang sekedar *hedging* yang dilakukan oleh beberapa negara lain (lihat juga Lim dan Cooper 2015). Salah satu poin penting yang digarisbawahi oleh Anwar adalah kemampuan Indonesia untuk mendorong ASEAN sebagai pemimpin

informalnya ke arah yang inklusif untuk kedua *great power* yang berkompetisi di Indo-Pasifik. Dalam penelitian yang lain, Agastia (2020) menunjukkan bahwa peran yang dicitrakan Indonesia sebagai *bridge-builder* memang sudah diterima oleh *great power* sehingga Indonesia bisa mewujudkan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Salah satu peneliti yang mempermasalahkan strategi Indonesia dalam Indo-Pasifik adalah Scott (2019) yang melihat bahwa upaya Indonesia sulit berhasil karena kelemahan kekuatan militer laut Indonesia. Semua penelitian yang telah disebutkan melihat posisi Indonesia sebagai *middle power* yang menjadi jembatan antara Amerika Serikat dan Cina dengan perbedaan dengan *middle power* yang lain. Namun, tulisan ini melihat bahwa perbedaan Indonesia tidak lebih daripada strategi *survival* dengan rasa yang lain dibandingkan dengan negara-negara *middle power* lain di Indo-Pasifik. Indonesia hanya dilihat berhasil karena Indonesia berhasil menjadi agen yang *survive* dalam struktur Indo-Pasifik. Jika menggunakan lensa poskolonial, struktur Indo-Pasifik yang problematis tidak dilihat sama sekali.

Jika melihat fenomena Indo-Pasifik dari lensa poskolonial, *great power politics* seharusnya dilihat dengan kecurigaan dan agen *middle power* di dalamnya tidak boleh dilihat dengan logika yang terlalu utilitarian. Mengingat argumentasi Ling (2002), negara poskolonial cenderung untuk melakukan *first-order* dan *second-order mimicry* atau mimikri tahap pertama dan kedua pasca-kemerdekaan. Kedua jenis mimikri tersebut juga memiliki nama lain, yakni mimikri formal (tahap pertama) dan mimikri substantif (tahap kedua). Mimikri yang dimaksud merujuk pada proses menyerupai penindasnya (mimikri formal) agar tidak dikenali dan mengganti struktur penindasan kolonial dengan struktur penindasan poskolonial melalui asimilasi dengan nilai dan norma tradisional (mimikri substantif). Tulisan ini mencurigai Indonesia menggunakan mimikri formal dan substantif untuk memanipulasi wacana agar sesuai dengan keinginan *great power* dalam konstelasi konstruksi Indo-Pasifik. Untuk membuktikan hal tersebut, tulisan ini menggunakan analisis wacana poskolonial.

3. METODE PENELITIAN

Salah satu keluhan peneliti yang menggunakan analisis wacana sebagai dasarnya adalah kebingungan saat menulis metode penelitian. Menurut Strange (2011, 242), “[t]he concept of methodology is potentially problematic within discourse theory [...]”. Hal ini disebabkan oleh keluasan dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh analisis wacana, terutama yang sifatnya kritis. Oleh sebab itu, untuk berkompromi dengan keharusan adanya metode penelitian, penelitian ini menjabarkan jenis analisis wacana apa yang dipilih, diimbuhkan dengan ideologi apa analisis wacana tersebut, dan kerangka teori untuk menjalankan logika penelitian ini.

Analisis Wacana Poskolonial

Analisis wacana yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana yang ideologis. Dalam analisis wacana, terdapat matriks dua-kali-dua sebagai kategorisasi tipe analisis wacana. Hal ini dijelaskan dengan lengkap oleh Phillips dan Hardy (2002). Matriks tersebut dibagi dalam dua dimensi, yakni dimensi kedalaman konteks (teks-konteks) dan keberadaan ideologi dalam analisis (konstruktivis-kritis). Dimensi kedalaman konteks mengatur seberapa jauh suatu teks, baik yang tertulis maupun yang terucap, dikaitkan dengan konteks yang melingkupinya. Kedalaman konteks yang rendah biasanya hanya melihat bagaimana dan mengapa suatu fenomena digambarkan dengan pilihan kata yang sedemikian rupa. Misalnya, dalam membangun konsensus dalam sebuah entitas, peneliti wacana dengan kedalaman konteks rendah membatasi analisisnya pada pilihan kata yang digunakan dalam pembentukan teks (lihat Mauws 2000). Aspek kedalaman konteks dibagi menjadi dua, yakni *distal* (jauh) dan *proximal*

(dekat) *contexts*. Konteks yang jauh merujuk pada hal-hal yang melingkupi identitas seseorang dilihat dari struktur sosial, misalnya kelas sosial, latar belakang etnis, institusi atau situs tempat terjadinya wacana, dan hal-hal lain (Phillips dan Hardy 2002). Konteks dekat merujuk pada situasi yang secara langsung melingkupi kejadian percakapan, seperti suasana percakapan yang interogatif atau bersahabat (Phillips dan Hardy 2002).

Dimensi ideologi dalam analisis wacana dilihat berdasarkan sensitivitas terhadap relasi kuasa - termasuk ideologi. Dimensi ideologi yang rendah, yakni konstruktivis, meninjau bagaimana realitas dikonstruksikan melalui penggunaan bahasa (Phillips dan Hardy 2002). Sementara itu, dimensi ideologi yang tinggi, yakni kritis, meninjau proses politik di dalam pewacanaan, termasuk cara ideologi pembicara membuat eksklusi dalam struktur sosial. Namun, bukan berarti analisis wacana yang konstruktivis sama sekali tidak membahas relasi kuasa di dalamnya dan yang kritis sama sekali tidak membahas proses konstruksi wacana. Menurut Riggins (1997, 2), hal penting dalam analisis wacana dengan dimensi ideologi tinggi adalah "the relation of language to power and privilege" tanpa harus memalingkan diri dari proses konstruksi wacana itu sendiri.

Analisis wacana dengan dimensi ideologi tinggi disebut dengan *critical discourse analysis* atau CDA. Dalam CDA, semua hal termasuk dalam wacana karena semua hal bermakna, relasional, ideologis, dan bergantung pada konteks. Wacana tidak hanya dilihat sebagai praktik pengucapan (*practice of enunciation*), melainkan sebagai sebuah grup sosial yang di dalamnya terdapat eksklusi dan inklusi - apakah seorang agen dalam sebuah struktur wacana memiliki *privilege* atau justru dirugikan? Proses eksklusi ini terjadi karena adanya proses pemaknaan yang terkandung dalam label yang digunakan dalam pewacanaan. Skinner (1989) bahkan menyatakan bahwa wacana dan realitas sosial tidak ada bedanya karena proses pewacanaan adalah proses membentuk realitas sosial. Oleh sebab itu, yang menjadi permasalahan adalah realitas yang diucapkan siapa yang diterima, mengapa bisa diterima, dan apa peran pewacanaan-pewacanaan lain selain yang menjadi hegemon. Dengan demikian, CDA memberikan perhatian besar pada proses eksklusi dalam wacana.

Ketika seorang peneliti telah menentukan bahwa ia menggunakan analisis wacana dengan dimensi ideologi tinggi, ia dihadapkan oleh pertanyaan berikut: Ideologi yang mana? Penelitian ini menggunakan lensa poskolonialisme dalam menyelenggarakan analisis wacana. Dalam analisis wacana berdasarkan poskolonialisme, penelitian ini akan melihat bagaimana pembentukan wacana menciptakan *Othering* dalam semua aktor yang melakukan pewacanaan (Sanz Sabido 2015). Wacana yang menjadi hegemoni biasanya menciptakan dikotomi normal/abnormal dengan beban identitas yang menjadi justifikasi eksklusi bagi mereka yang dianggap abnormal; agen yang dikonstruksikan abnormal diperlakukan dengan cara yang derogatif (Hall 1997). Dengan kata lain, wacana adalah sebuah wadah kompetitif antar-agen. Kompetisi dalam wacana yang berujung pada identitas membentuk status sosial sebagai penanda apakah agen tersebut berada di dalam atau di luar *in-group* (Ward 2020). Karena beban identitas tersebut, agen-agen yang tergabung dalam wacana berupaya untuk masuk ke dalam *in-group* dengan cara menyelaraskan pewacanaannya dengan wacana dominan.

Karena wacana adalah sebuah konstruksi yang menentukan proses inklusi atau eksklusi sosial, penelitian ini melihat wacana seperti ruangan tempat agen berwacana keluar dan masuk. Argumen ini dibenarkan oleh Epstein (2010) yang menyatakan bahwa relasi antara wacana dan agen berwacana adalah subject-position - agen bisa memilih seberapa dekat ia berada relatif terhadap wacana dominan. Menurut Epstein (2010, 343, cetak miring sesuai aslinya), "a subject-position refers to a position within a discourse". Jika digabungkan dengan pemahaman sebelumnya mengenai *in-* dan *out-group* dari sebuah wacana, maka agen mendapatkan insentif untuk menempatkan diri sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam poskolonialisme, suatu agen poskolonial bisa

memperlihatkan diri dekat dengan wacana tertentu yang dikuasai oleh kekuatan kolonial semata-mata untuk melindungi diri dan mendapatkan manfaat dari wacana tersebut. Konsep ini dikenal dengan nama mimikri.

Mimikri Poskolonial

Mimikri, seperti konsep aslinya dalam biologi, adalah aktivitas menyerupai lingkungan agar terhindar dari aktivitas predasi dari makhluk lain. Dalam konteks poskolonialisme, mimikri adalah strategi bertahan hidup dalam penindasan kolonial dan poskolonial. Awalnya, mimikri dikonseptualisasikan oleh Bhabha (1994) terkait ambivalensi dari keadaan kultural kolonial. Di satu sisi, para penjajah sengaja menciptakan wacana yang membuat batas antara masyarakat penjajah dan masyarakat terjajah. Di sisi lain, para penjajah tidak paham mengenai kultur dan logika masyarakat terjajah; oleh sebab itu, masyarakat terjajah perlu mengadopsi gaya hidup, termasuk logika, dari penjajahnya.

Konsep mimikri ini kemudian diperkaya melalui klasifikasi strategi masyarakat terjajah dalam melakukan hal tersebut. Klasifikasi tersebut, menurut Ling (2002), adalah mimikri formal atau *first-order mimicry* dan mimikri substantif atau *second-order mimicry*. Dalam mimikri formal, agen terjajah meniru penjajahnya tanpa benar-benar mengubah esensi diri menjadi penjajah. Dalam bahasa yang digunakan Ling (2002, 116), mimikri formal “replicates an affect of the Self by the Other such as, for example, the current fashion of young Asians and Africans [...]” yang berujung pada sifat “[...] dichotomized, superficial, contradictory, and forever emulative”. Sebaliknya, mimikri substantif bersifat asimilatif dan mengubah diri masyarakat terjajah menjadi suatu entitas baru yang merupakan percampuran nilai-nilai tradisional dan modalitas penjajahan modern. Menurut Ling (2002, 117, cetak miring sesuai aslinya), mimikri substantif “[...] draws on the cultural richness of *mélange* multiplicity without miring the problem solver in its divisive differences”. Dengan kata lain, mimikri substantif tidak hanya terbatas pada peniruan si penjajah saja; namun, kultur yang ‘diajarkan’ oleh penjajah yang berupa penindasan diadopsi oleh siterjajah dan diadaptasi dengan nilai-nilai tradisionalnya.

Penelitian ini mengadopsi konsep mimikri dan menjabarkannya lebih lanjut agar sesuai dengan analisis wacana. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ling dengan menggunakan *fashion* sebagai contoh, mimikri formal merupakan upaya terbatas agarsi terjajah menyerupai si penjajah. Keserupaan tersebut merupakan cara agar si terjajah tidak lagi dianggap *out-group* yang disebabkan oleh perbedaan antara keduanya. Dilihat dengan perspektif wacana yang sudah dijelaskan sebelumnya, mimikri formal merupakan upaya diskursif dalam suatu wacana kolonial yang sifatnya dikotomis normal/abnormal agar si terjajah yang tadinya dianggap abnormal menjadi dianggap normal. Dengan kata lain, mimikri formal merupakan upaya diskursif untuk membalikkan proses *Othering*.

Dengan demikian, konsep mimikri menginformasikan metode analisis wacana kritis poskolonial dalam penelitian ini. Tulisan ini meyakini bahwa wacana sebagai sebuah struktur sosial menjadi landasan relasi kuasa antar-agen. Struktur sosial tersebut mengatur - sesuai dengan kehendak agen-agen *in-group* - siapa yang diuntungkan dan siapa yang tidak diuntungkan. Oleh sebab itu, mimikri formal adalah strategi diskursif dalam wacana hegemoni agar (1) yang berada di *out-group* tidak terlalu dikucilkan atau (2) yang berada di *out-group* bisa masuk ke dalam *in-group*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wacana Indo-Pasifik dan Eksklusi Sosial

Great power politics dalam Indo-Pasifik, selain berbentuk pertentangan strategis-militeristis, juga berbentuk pertentangan wacana. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa negara-negara yang bersitegang juga ikut mewacanakan apa yang menjadi Indo-

Pasifik ideal menurut mereka masing-masing. Pewacanaan bentuk Indo-Pasifik yang ideal tersebut juga membawa eksklusi diskursif bagi *great power* yang menjadi lawannya. Selain *great power*, agen-agen yang dikonstruksikan sebagai *middle power* juga berupaya untuk membuat pewacanaan baru yang berkaitan dengan inklusi dan eksklusi Indo-Pasifik. Pewacanaan yang dilakukan oleh *middle power*, meskipun ditujukan untuk menjadi inklusif bagi semua yang berkonflik, juga bertujuan untuk menginklusi dirinya sendiri. Dengan demikian, konsep mimikri dalam kasus pewacanaan Indo-Pasifik oleh *middle power* terpenuhi dalam kasus ini. Untuk membuktikan hal tersebut, bagian ini melihat lebih lanjut konstruksi Indo-Pasifik yang dilakukan oleh beberapa negara, baik yang diwacanakan sebagai *great power* maupun yang diwacanakan sebagai *middle power*.

Amerika Serikat sebagai *great power* yang berkepentingan dalam Indo-Pasifik telah membuat pewacanaan mengenai Indo-Pasifik bersama dengan Jepang dalam sebuah konsep yang diberi nama *Free and Open Indo-Pacific*. Dalam salah satu pengucapan atau *enunciation* pertama kali, tepatnya dalam pidato untuk Parlemen India, Jepang menyatakan bahwa konstruksi Indo-Pasifik diniatkan sebagai pemekaran atau penguatan Asia yang didefinisikan sebagai wilayah yang diimpit oleh dua samudera, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik (Abe 2007). Hosoya (2019) menganalisis lebih jauh pidato yang diberikan oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Shinzo Abe: Konstruksi Indo-Pasifik tersebut ditekankan untuk negara-negara Asia yang berdemokrasi. Ia bahkan mengutip Shinzo Abe yang mengatakan bahwa konstruksi Indo-Pasifik bertujuan untuk “promoting democracy, freedom, human rights, and the rule of law [...] along the Eurasian continent to form a rich and stable region based on universal values” (Hosoya 2019, 20). Dengan kata lain, pewacanaan yang dilakukan Abe bersifat universal.

Permasalahan yang inheren dalam konsep universalitas adalah pemaksaan yang terkandung di dalamnya. Karena dalam politik global tidak ada nilai yang dianut secara universal, terlebih lagi demokrasi, penggunaan demokrasi dan hak asasi manusia sebagai syarat agar dikategorikan sebagai *in-group* bermasalah. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa nilai-nilai seperti hak asasi manusia dan demokrasi merupakan hasil dari pemikiran Pencerahan Barat yang dipaksakan ke Timur (Chakrabarty 2000, 4). Terlebih lagi, nilai-nilai yang sebetulnya provinsial dalam masyarakat Barat diwacanakan sebagai nilai-nilai yang universal. Dalam kasus Jepang dan pewacanaan Indo-Pasifik yang dilakukannya, dijadikannya demokrasi dan hak asasi manusia - dengan tidak melihat secara kritis implementasinya dalam masyarakat yang bukan Barat - berarti mengeksklusikan negara-negara yang secara tradisional tidak menjunjung tinggi dua konsep tersebut. Negara-negara seperti Cina yang memang secara ideologis berseberangan dengan Barat dan nilai-nilainya menjadi tersisihkan dalam konstruksi Jepang mengenai Indo-Pasifik.

Secara eksplisit, konstruksi Indo-Pasifik dalam konsep *Free and Open Indo-Pacific* memang sengaja dibuat untuk menyeimbangkan pengaruh Cina di kawasan Asia. Misalnya, dalam analisis yang dilakukan oleh Hosoya (2019), konstruksi Indo-Pasifik yang dilakukan oleh Jepang sengaja dilakukan agar pengaruh Asia tetap dipegang oleh grup Amerika Serikat. Grup Amerika Serikat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah negara-negara yang memang menganut nilai-nilai Barat seperti demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam artikel yang sama, tindakan Jepang disebut sebagai respons dari diskusi antara empat negara yang menjadi negara ‘inti’ demokrasi dan hak asasi manusia yang disebut Quadrilateral Security Dialogue atau Quad dalam perseteruan Asia, yakni Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India. Dalam kasus lain yang menunjukkan bahwa konstruksi Jepang mengenai Indo-Pasifik secara eksplisit bertujuan untuk menyeimbangi pengaruh Cina di Asia, Australia mengundurkan diri dari Quad yang disebabkan oleh kekhawatiran Australia mengenai keikutsertaannya yang dianggap akan

mengganggu hubungan politiknya dengan Cina (Tan 2020). Dua hal menjadi jelas mengenai *Free and Open Indo-Pacific* yang dikonstruksikan Jepang dengan dibantu oleh Quad, yakni bahwa konstruksi Indo-Pasifik tersebut (1) merupakan upaya untuk menanggulangi pengaruh Cina di kawasan dan (2) merupakan sebuah *great power politics* di kawasan Asia.

Wacana *Free and Open Indo-Pacific* tidak bergerak di tempat sebagai strategi untuk menyeimbangi pengaruh Cina di kawasan Asia, setidaknya bagi pewacanaan yang dilakukan Jepang. Pada saat pertemuan di Nairobi pada tahun 2016, Jepang menyatakan bahwa negara tersebut perlu mengakomodasi kepentingan Cina agar tidak terjadi persengketaan regional (Hosoya 2019). Bahkan, Jepang lebih jauh mengakomodasi Cina dengan cara menyatakan bahwa konsep *Free and Open Indo-Pacific* bukan merupakan satu kesatuan dengan Quad (Tan 2020). Meskipun demikian, seperti yang dinyatakan oleh Kitaoka (2019), wacana Indo-Pasifik Jepang tetap memegang teguh ekspansi nilai-nilai Barat yang berupa demokrasi dan hak asasi manusia. Alasannya adalah Jepang merupakan negara yang tidak sekuat Amerika Serikat, Cina, dan Rusia; oleh sebab itu, pembangunan dan keselamatan Jepang bergantung pada diadopsinya nilai-nilai tersebut di kawasan Asia.

Meskipun beberapa negara Quad telah berupaya mengakomodasi Cina, Cina tetap melihat konsep *Free and Open Indo-Pacific* sebagai ancaman terhadap eksistensi negaranya di kawasan Asia. Insisa (2022), misalnya, menyatakan bahwa Cina merasakan ancaman terhadap konstruksi Indo-Pasifik karena kenyataan material bahwa alur laut Cina di Laut Cina Selatan berpotensi terganggu dengan adanya proposal dalam *Free and Open Indo-Pacific*. Hal ini diakibatkan oleh kepentingan material Cina yang memang sudah ada di kawasan, misalnya Kepulauan Spratly dan *Nine-Dash Line*, terlepas dari kontroversi yang mengelilingi dua hal tersebut. Selain itu, konstruksi Indo-Pasifik yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Jepang secara spesifik menyasar hal-hal yang menjadi kepentingan Cina di kawasan seperti kebebasan navigasi dan penghormatan terhadap kedaulatan (Tan 2020). Dengan demikian, klaim bahwa konstruksi Indo-Pasifik yang dilakukan dan didorong oleh Amerika Serikat dan Jepang tidak betul-betul bersifat inklusif untuk semua kalangan di Indo-Pasifik, terutama Cina.

Konteks yang menyelimuti pewacanaan Indo-Pasifik juga perlu dilihat untuk memahami untuk kepentingan apa Indo-Pasifik diwacanakan. Wacana Indo-Pasifik yang didukung Amerika Serikat muncul bersamaan dengan, dan didorong oleh, wacana anti-Cina yang berkembang di Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump (Tan 2020). Akibatnya, Indo-Pasifik tidak dikonstruksikan dengan semangat inklusivitas tetapi eksklusivitas karena pewacanaan tersebut mengundang asertivitas Cina lebih jauh lagi di kawasan (Swaine 2018). Hal ini diakibatkan oleh konstruksi mengenai Cina dalam wacana Indo-Pasifik yang dilakukan oleh Amerika Serikat, yakni "a clear threat engaged in unqualified "predatory" lending and other destructive practices that undermine the freedom and sovereignty of developing nations" (Swaine 2018). Dengan kata lain, wacana Indo-Pasifik yang dilakukan oleh Amerika Serikat merupakan wacana yang eksklusif dan kombatif terhadap Cina.

Bagian ini telah dengan jelas menjabarkan bahwa konstruksi Indo-Pasifik bukanlah sebuah pewacanaan yang netral melainkan penuh dengan kekuatan politik dengan kepentingan masing-masing. Yang menjadikan perseteruan ini lebih kompleks adalah kekuatan politik yang dimaksud adalah kekuatan besar atau *great power politics*. Selain itu, perseteruan ini juga bersifat diskursif: Idealisme yang terkandung dalam kata-kata yang mengonsepan Indo-Pasifik tidak mencerminkan - entah dengan sengaja atau tidak sengaja - kenyataan material. Dengan kata lain, idealisme inklusivitas yang ada dalam *Free and Open Indo-Pacific* tidak tercermin dalam praktik eksklusif, terutama terhadap Cina. Karena Indo-Pasifik tidak hanya diisi oleh negara-negara *great power* seperti

Amerika Serikat dan Cina, bagian selanjutnya membahas respons negara-negara *middle power* dalam merespons *great power politics* tersebut.

Middle Power di Tengah Indo-Pasifik

Imbas persetujuan Indo-Pasifik, baik yang menyangkut *Free and Open Indo-Pacific* atau permasalahan sebelumnya seperti sengketa Laut Cina Selatan, dialami oleh negara-negara yang tidak secara langsung berkepentingan dalam konstruksi Indo-Pasifik. Imbas ini menjadikan dilema seperti yang diteorisi oleh para neorealis: Apakah negara-negara *middle power* ini perlu melakukan *balancing* atau *bandwagoning* (lihat Roy 2005)? Bahkan, ada ekstensi dari dua konsep tersebut yang diaplikasikan dalam konstruksi *middle power* adalah strategi *hedging* (Kuik 2022). Bagaimana pun, *middle power* diwacanakan dalam konstruksi Indo-Pasifik sebagai negara-negara yang berada dalam situasi kompleks yang mengharuskan mereka untuk menyelamatkan diri.

Negara-negara yang dikonstruksikan sebagai *middle power* dalam kontestasi Indo-Pasifik memiliki strategi yang berbeda-beda dalam menyeimbangkan dirinya di antara *great power*. Abbondanza (2022) memberikan tiga negara sebagai contoh, yakni Australia, Korea Selatan, dan Indonesia. Australia sebagai bagian dari Quad dikonstruksikan sebagai negara *middle power* karena kepentingannya untuk menyeimbangkan diri antara Cina dan Amerika Serikat dalam konstruksi Indo-Pasifik. Strategi yang digunakan oleh Australia adalah upaya untuk memperlihatkan posisi dirinya dalam persetujuan tersebut sekabur mungkin: tidak bersama Cina dan Amerika Serikat. Meskipun demikian, Australia tetap membutuhkan Cina sebagai negara tujuan dagang dan Amerika Serikat sebagai penyedia keamanan di kawasan. Serupa dengan Australia, Korea Selatan juga mengedepankan fasad “strategic ambiguity” (Abbondanza 2022, 406). Tujuan Korea Selatan melakukan ini adalah untuk tetap menjalin kerja sama pertahanan di kawasan bersama Amerika Serikat dan ASEAN. Korea Selatan tidak ingin memperkeruh kontestasi kawasan dengan melakukan hal-hal yang mungkin mendorong asertivitas Cina. Kedua negara ini melakukan strategi *hedging* agar tetap dapat mendapat keuntungan dari dua *great power* yang sedang berseteru. Di sisi lain, Indonesia tidak melakukan *hedging* yang vulgar seperti dua negara yang sudah disebutkan; sebaliknya, Indonesia berupaya untuk membangun jalan ketiga yang lebih inklusif daripada *Free and Open Indo-Pacific* yang tidak seinklusif klaimnya. Dengan kata lain, Indonesia membuat konstruksi tandingan mengenai Indo-Pasifik.

Melalui dokumen yang diberi judul ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, Indonesia menyatakan kembali inklusivitas yang harus ada dalam pewacanaan Indo-Pasifik. Dengan menempatkan ASEAN sebagai mekanisme pusat Indo-Pasifik, Indonesia menjabarkan inklusivitas yang dimaksudnya dengan memasukkan dialog dan kerja sama berbasis institusi, misalnya East Asia Summit. Tujuan bersama yang diharapkan dari Indo-Pasifik untuk semua pihak yang berkepentingan di dalamnya adalah pembangunan dan kesejahteraan bagi semua. Lebih jauh, pilar-pilar yang dianut oleh *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* mencakup (1) kerja sama, (2) stabilitas dan perdamaian, (3) ASEAN Community, dan (4) hal-hal lain seperti kerja sama maritim, konektivitas, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan lain-lain. Bagian selanjutnya dari *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* merujuk pada pembahasan teknis dari area kerja sama yang dimaksud, seperti yang sudah disebutkan, yakni kerja sama maritim, konektivitas, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Secara diskursif, perbedaan paling jelas antara *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* dan *Free and Open Indo-Pacific* adalah tidak adanya aspek moralis dalam dokumen yang dikeluarkan oleh ASEAN. Indonesia melalui ASEAN tidak mensyaratkan adanya demokrasi dan hak asasi manusia untuk menjadi bagian dari konstruksi Indo-Pasifik. Hasilnya, Cina tidak secara pra-diskursif tersisihkan dari konstruksi tersebut.

Selain itu, konstruksi Indo-Pasifik juga tidak terkesan sebagai klub untuk menyebarkan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi Barat.

Selain itu, pewacanaan Indonesia mengenai Indo-Pasifik yang inklusif juga harus dilihat dengan konteks hubungan Indonesia dan ASEAN. Indonesia adalah negara yang secara aktif berupaya untuk menjadi pemimpin informal ASEAN. Meskipun Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tidak terlalu bergairah dalam berpolitik luar negeri, Indonesia tetap memimpin dalam menyusun wacana *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* karena menyangkut hubungan dan kerja sama maritim (Dannhauer 2022). Kepemimpinan Presiden Joko Widodo membentuk strategi diskursif Indonesia dalam mewacanakan Indo-Pasifik, terutama dalam kaitannya dengan, salah satunya, aspek kerja sama yang ditekankan. Hal ini juga berpengaruh terhadap apa yang dimaksud dengan sentralitas ASEAN dalam pewacanaan Indo-Pasifik Indonesia. Sentralitas ASEAN dalam Indo-Pasifik dibahasakan dengan menggunakan logika untung/rugi, khususnya dalam pemetaan *global value chains* (Fujita 2021). Selain itu, pewacanaan tersebut diutarakan dengan harapan agar hubungan ekonomi negara-negara Indo-Pasifik disalurkan melalui infrastruktur integrasi ekonomi yang sudah dibangun oleh ASEAN melalui *ASEAN Trade in Goods Agreement* atau ATIGA, *ASEAN Trade in Services Agreement* atau ATISA, dan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* atau ACIA (Tundang 2019). Dengan kata lain, konteks hubungan antara Indonesia dan ASEAN - yakni kepemimpinan Indonesia di ASEAN - menjadikan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* berkonsentrasi pada hal-hal yang sifatnya ekonomi.

Inklusivitas yang digagas oleh Indonesia dalam pewacanaan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* perlu dilihat akibatnya dengan cara mengukur respons pihak-pihak yang bertikai dan kedalaman inklusivitas yang dimaksud. Secara teoretis, pewacanaan tersebut menjadi angin segar bagi Cina karena ia berhasil membangun sebuah konstruktpolitik yang menysasar pada tujuan *shared prosperity* (lihat Calabrese 2020). Secara praktis, pewacanaan tersebut diterima oleh Cina sebagai negara yang sejak awal tersisihkan dari konstruksi Indo-Pasifik. Hal ini dibuktikan dengan respons baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Cina dalam rilis yang berjudul "Position Paper of the People's Republic of China on Supporting ASEAN Centrality in the Evolving Regional Architecture" (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China 2022). Dalam dokumen tersebut, pemerintah Cina mengakui sentralitas ASEAN dalam pewacanaan Indo-Pasifik. Selain itu, pihak Cina juga secara spesifik menyatakan bahwa mereka siap bekerja sama untuk membangun keterbukaan dan inklusivitas yang dijabarkan dalam *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*.

Dilihat sekilas, pewacanaan Indonesia mengenai Indo-Pasifik melalui ASEAN berhasil untuk mempersatukan dua *great power* yang bertikai dalam pewacanaan wilayah tersebut. Pewacanaan tersebut memvalidasi simpulan yang diberikan oleh Abbondanza yang telah dikutip oleh penelitian ini. Namun, tinjauan diskursif lebih jauh memperlihatkan setidaknya dua hal, yakni (1) strategi Indonesia tidak jauh berbeda dengan *hedging* yang dilakukan oleh Australia dan Korea Selatan - Indonesia hanya lebih cakap dalam melakukan strategi tersebut dan (2) pewacanaan yang terkandung dalam *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* tidak menyelesaikan *great power politics* yang terjadi di kawasan.

Pewacanaan Indonesia: Discursive Hedging

Bagian analisis ini akan mengaitkan apa yang telah Indonesia lakukan dengan dua hal. Pertama, Indonesia tidak melampaui strategi yang dilakukan oleh Australia dan Korea Selatan dalam melakukan *hedging*. Artinya, Indonesia tetap melakukan *hedging* secara diskursif dan lebih berhasil secara performatif dibandingkan kedua negara tersebut. Kedua, meskipun Indonesia mengklaim bahwa konstruksi *ASEAN Outlook on*

the Indo-Pacific lebih inklusif dibandingkan konstruksi-konstruksi Indo-Pasifik lainnya, pewacanaan yang dilakukan Indonesia tidak pernah keluar - atau berupaya menyelesaikan - *great power politics* yang terjadi di kawasan. Kedua poin tersebut dapat dijelaskan melalui kacamata konsep mimikri, baik mimikri formal dan substantif.

Hedging yang dilakukan Indonesia dapat dilihat dari konsep yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni mimikri formal. Sebagai pengingat, mimikri formal terjadi ketika pihak terjajah mengikuti logika pihak penjajah untuk mengaburkan batas antara yang terjajah dan yang menjajah. Mimikri ini berada dalam tatanan yang superfisial atau permukaan. Dengan kata lain, strategi mimikri yang dilakukan hanya mencakup, antara lain, model diskursif.

Dalam kasus Indonesia, *hedging* yang dilakukan hanya menyentuh tatanan permukaan pewacanaan saja. Misalnya, dalam membuat ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, upaya inklusif yang dilakukan Indonesia dalam aspek ideologis hanya berupa pelucutan kata-kata hak asasi manusia dan demokrasi dari dalam persyaratan untuk ikut dalam konstruksi Indo-Pasifik. Akibatnya, Cina tidak lagi tersisihkan dari konstruksi tersebut. Meskipun demikian, jika dilihat melalui konteks ketegangan yang terjadi di Laut Cina Selatan, rekonfigurasi makna inklusi yang dilakukan Indonesia tidak berkontribusi apa-apa terhadap penyelesaian konflik tersebut. Ini justru merupakan sebuah langkah mundur dari konstruksi Jepang mengenai Indo-Pasifik yang bertujuan untuk menghalau strategi ekspansionis Cina melalui eksklusi sosial. Dengan demikian, konstruksi Indonesia mengenai Indo-Pasifik memang mengakomodasi Cina tetapi dengan ongkos tertentu, yakni mempertahankan *status quo*.

Melihat kasus Indonesia dalam pewacanaan Indo-Pasifik bisa dilihat lebih dalam, yakni melalui konsep mimikri substantif. Mimikri substantif, seperti yang sudah dijelaskan, adalah strategi yang digunakan oleh pihak terjajah untuk membuat sistem baru yang mengadaptasi realitas penjajah dengan realitas terjajah. Dalam kasus pewacanaan Indo-Pasifik, realitas 'penjajah' merujuk pada *great power politics* yang menyeret Indonesia dan negara-negara lain di kawasan. *Great power politics* tersebut menjadi tantangan material yang harus dihadapi Indonesia. Namun, dalam menavigasi realitas ini, Indonesia mengadopsi realitasnya sendiri yang bisa diselesaikan dengan cara memanfaatkan konflik tersebut, yakni kepemimpinannya di ASEAN dan kerja sama dengan dua *great power* yang berbasis logika ekonomi. Pewacanaan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* memberikan ruang bagi Indonesia untuk 'menyeimbangkan' diri di posisi yang penuh untung secara ekonomi di antara dua *great power*.

Jika dilihat secara konseptual dengan lebih dalam, strategi diskursif Indonesia tidak menysar dinamika *great power politics* yang berkembang dalam pewacanaan Indo-Pasifik. Indonesia lebih menysar dinamika identitasnya dalam politik internasional. Alih-alih menciptakan struktur diskursif yang secara material lebih inklusif dan substantif bagi pihak Amerika Serikat dan pihak Cina, Indonesia memilih untuk terlihat inklusif bagi Amerika Serikat dan terlihat inklusif bagi Cina. Hal ini sudah dibuktikan melalui pewacanaan Indonesia mengenai Indo-Pasifik yang mempertahankan *status quo*. Dengan demikian, Indonesia dalam konflik Indo-Pasifik ini hanya melakukan *discursive hedging*.

Konsep terakhir yang dijelaskan dalam kerangka teori, *subject-position*, juga mempertahankan argumen dinamika identitas Indonesia. Jika dilihat dari pemosisian, Indonesia mengikuti wacana dominan soal inklusif yang non-substantif. Artinya, Indonesia hanya melakukan problematisasi pemaknaan inklusi yang dikeluarkan oleh Jepang, yakni inklusi yang berdasarkan nilai Barat, yakni demokrasi dan hak asasi manusia. Indonesia tidak menysar problematisasi wacana yang lebih dalam, yakni asertivitas Cina dan strategi ekspansionisnya. Jika dilihat dari *subject-position*, Indonesia melakukan pewacanaan yang berjarak dari pewacanaan Jepang tetapi tidak agnostik

terhadap wacana ekspansionis Cina. Dampak yang ditimbulkan dari *subject-position* ini adalah Indonesia tampak inklusif tanpa betul-betul membahas asertivitas Cina di kawasan.

5. KESIMPULAN

ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang menjadi perhatian ilmuwan politik internasional pada kenyataannya tidak lebih baik daripada strategi *hedging* yang dilakukan oleh Australia dan Korea Selatan. Tidak lebih baik yang dimaksud di sini adalah posisi yang diajukan oleh Indonesia hanya menyasar keuntungan diri sendiri walaupun dengan etalase inklusivitas. Kasus Indonesia ini berkontribusi bagi pengembangan konsep mimikri dan *subject-position*, yakni aplikasi kedua konsep tersebut pada dinamika politik internasional kekinian dengan latar belakang *great power politics*.

Penelitian lebih lanjut diperlukan jika melihat temuan yang ada dalam penelitian ini. Pertama, diperlukan penelitian yang mengonseptualisasi temuan di penelitian ini lebih jauh, terutama terkait dengan konsepsi *middle power* poskolonial. Kedua, karena Cina sejatinya adalah negara poskolonial, penelitian terpisah diperlukan untuk mengkaji bagaimana hegemoni yang dilakukan oleh negara poskolonial bisa terjadi, apa dampaknya, dan bagaimana melihatnya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Gaffar Mu'aqaffi dan Adam Salsa Novarinatas kontribusi pemikiran ketika tulisan ini masih berbentuk draf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbondanza, Gabriele. 2022. "Whither the Indo-Pacific? Middle Power Strategies from Australia, South Korea and Indonesia." *International Affairs* 98(2): 403-21.
- Abe, Shinzo. 2007. "Confluence of the Two Seas."
- Agastia, I Gusti Bagus Dharma. 2020. "Understanding Indonesia's Role in the 'ASEAN Outlook on the Indo-Pacific': A Role Theory Approach." *Asia & the Pacific Policy Studies* 7(3): 293-305.
- Anwar, Dewi Fortuna. 2020. "Indonesia and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific." *International Affairs* 96(1): 111-29. <https://doi.org/10.1093/ia/iiz223>.
- Bhabha, Homi K. 1994. *The Location of Culture*. New York: Routledge.
- Calabrese, John. 2020. "ASSURING A FREE AND OPEN INDO-PACIFIC - REBALANCING THE US APPROACH." *Asian Affairs* 51(2): 307-27.
- Chakrabarty, Dipesh. 2000. *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*. Princeton: Princeton University Press.
- Dannhauer, Pia. 2022. "Elite Role Conceptions and Indonesia's Agency in the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: Reclaiming Leadership." *The Pacific Review*: 1-26.
- Epstein, Charlotte. 2010. "Who Speaks? Discourse, the Subject and the Study of Identity in International Politics." *European Journal of International Relations* 17(2): 327- 50. <https://doi.org/10.1177/1354066109350055>.
- Fujita, Masataka. 2021. "Can ASEAN Retain Centrality in Indo-Pacific Region? - From a GVC Point of View." *Journal of Contemporary East Asia Studies* 10(1): 108-22.
- Hall, Stuart. 1997. *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London: SAGE Publications.
- Hosoya, Yuichi. 2019. "FOIP 2.0: The Evolution of Japan's Free and Open Indo-Pacific Strategy." *Asia-Pacific Review* 26(1): 18-28.

- Huynh, Tam-Sang. 2021. "Bolstering Middle Power Standing: South Korea's Response to U.S. Indo-Pacific Strategy from Trump to Biden." *The Pacific Review*. 1-29.
- Iksan, Muhamad, dan Jenn-Jaw Soong. 2022. "The Political Economy of Indonesia's Development Strategy under China-USA Power Rivalry and Hegemonic Competition: A Middle Power with Its Hedging Strategy." *The Chinese Economy*. 1-17.
- Insisa, Aurelio, dan Giulio Pugliese. 2022. "The Free and Open Indo-Pacific versus the Belt and Road: Spheres of Influence and Sino-Japanese Relations." *The Pacific Review* 35(3): 557-85.
- Kim, Jaeyoung. 2022. "The Agency of Secondary States in Order Transition in the Indo-Pacific." *The Pacific Review*. 1-29.
- Kitaoka, Shinichi. 2019. "Vision for a Free and Open Indo-Pacific." *Asia-Pacific Review* 26(1): 7-17.
- Kuik, Cheng-Chwee. 2022. "Shades of Grey: Riskification and Hedging in the Indo-Pacific." *The Pacific Review*. 1-34.
- Lim, Darren J., dan Zack Cooper. 2015. "Reassessing Hedging: The Logic of Alignment in East Asia." *Security Studies* 24(4): 696-727.
- Ling, L. H. M. 2002. "Cultural Chauvinism and the Liberal International Order: 'West versus Rest' in Asia's Financial Crisis." Dalam *Power, Postcolonialism and International Relations: Reading Race, Gender, and Class*, ed. Geeta Chowdhry dan Sheila Nair. London: Routledge.
- Mauws, Michael K. 2000. "But Is It Art?" *The Journal of Applied Behavioral Science* 36(2): 229-44.
- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. 2022. "Position Paper of the People's Republic of China on Supporting ASEAN Centrality in the Evolving Regional Architecture." Communiqués.
- Nagy, Stephen R. 2022. "US-China Strategic Competition and Converging Middle Power Cooperation in the Indo-Pacific." *Strategic Analysis* 46(3): 260-76.
- Pan, Chengxin. 2014. "The 'Indo-Pacific' and Geopolitical Anxieties about China's Rise in the Asian Regional Order." *Australian Journal of International Affairs* 68(4): 453-69.
- Phillips, Nelson, dan Cynthia Hardy. 2002. *Discourse Analysis*. 2455 Teller Road, Thousand Oaks California 91320 United States of America : SAGE Publications, Inc.
- Riggins, Stephen Harold. 1997. *The Language and Politics of Exclusion: Others in Discourse*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Roy, Denny. 2005. "Southeast Asia and China: Balancing or Bandwagoning?" *Contemporary Southeast Asia* 27(2): CS27-2g.
- Sanz Sabido, Ruth. 2015. "Palestine in the British Press: A Postcolonial Critical Discourse Analysis." *Journal of Arab & Muslim Media Research* 8(3): 199-216.
- Scott, David. 2019. "Indonesia Grapples with the Indo-Pacific: Outreach, Strategic Discourse, and Diplomacy." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 38(2): 194-217.
- Skinner, Quentin. 1989. "Language and Political Change." Dalam *Political Innovation and Conceptual Change*, ed. Terence Ball, James Farr, dan Russell L. Hanson. Cambridge: University of Cambridge.
- Strange, Michael. 2011. "Discursivity of Global Governance." *Alternatives: Global, Local, Political* 36(3): 240-56.
- Swaine, Michael D. 2018. "Creating an Unstable Asia: The U.S. 'Free and Open Indo-Pacific' Strategy." Carnegie Endowment for International Peace.
- Tan, See Seng. 2020. "Consigned to Hedge: South-East Asia and America's 'Free and Open Indo-Pacific' Strategy." *International Affairs* 96(1): 131-48.
- Tundang, Ronald Eberhard. 2019. "Indo-Pacific Economic Architecture: An ASEAN

Perspective.” *Proceedings of the ASIL Annual Meeting* 113: 381-83.
Ward, Steven. 2020. “Status, Stratified Rights, and Accommodation in International Relations.” *Journal of Global Security Studies* 5(1): 160-78.
<https://doi.org/10.1093/jogss/ogz014>.